BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Arum Sekar, 2023**. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masalah kemiskinan yang membuat pemerintah harus menanggulangi masalah tersebut untuk membantu mensejahteraan masyarakat yang kurang mampu, salah satunya adalah dengan mengadakan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) khususnya di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dengan adanya program BPNT ini yang kemudian dibuat beberapa ketepatan yang menjadi sasaran dalam program BPNT tidak sesuai kriteria yang akhirnya membuat bantuan ini tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan efektivitas program BPNT terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan Teknik analisis datanya menggunakan kondensasi data (pemilihan, pengerucutan, peringkasan, penyenderhanaan, dan transpormasi) . Penyajian data dan penarikan kesimpulan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang diperoleh dari Teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT yang ada di Desa

Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan kurang efektif karena tidak dilakukan sosialisasi oleh aparat desa maupun penanggung jawab BPNT kepada KPM terkait pemahaman program, maksud dan tujuan program abntuan ini diadakan. Selain itu, ketepatan sasarannya juga kurang tepat karena masih terdapat beberapa penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BPNT. Adapun hal lain yang juga membuat bantuan ini kurang efektif adalah waktu penyaluran bantuannya yang tidak tepat waktu dan membuat para keluarga penerima manfaat (KPM) harus menunggu lebih lama untuk menerima bantuan tersebut.

2. **Sari, 2021.** Universitas Negeri Makassar. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukamaju. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) sebagai salah satu program perlindungan sosial pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat (KPM) . Program BPNT merupakan transformasi dari program bantuan pangan sebelumnya (Rastra) yang diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi penyaluran, serta transparansi melalui sistem non tunai. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, menyimpulkan bahwa efektivitas program BPNT di Kecamatan Sukamaju berada pada kategori cukup efektif, namun masih memerlukan berbagai perbaikan agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal. Oleh

karena itu, disarankan agar pemerintah melakukan pembaharuan data secara berkala, meningkatkan kualitas bahan pangan. Dengan demikian, diharapkan program BPNT dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraaan masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan hasil, memiliki pengaruh, akibat, atau efek, serta memiliki nilai guna. Sementara itu, efektivitas dimaknai sebagai keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2019:86), efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, dimana suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menekankan bahwa ukuran utama efektivitas terletak pada tingkat pencapaian hasil dibandingkan dengan target yang direncanakan.

Selanjutnya, Mutiarin dan Zaenudin (2020:112) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas hasil yang diperoleh. Dengan

demikian, efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya tujuan, tetapi juga dari bagaimana kualitas hasil tersebut.

Menurut Sutrisno (2019:123), efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas juga berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara efisien dalam proses pencapaian tujuan.

Secara umum, teori efektivitas berorientasi pada hasil dan tujuan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas suatu organisasi atau program. Sebaliknya, apabila tujuan yang telah direncanakan tidak tercapai, maka tingkat efektivitasnya dapat dikatakan rendah.

Efektivitas secara umum adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur berdasarkan kualitas, kualitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagian dalam Sucahyowati (2017:12) memberikan definisi bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas tersebut menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran maka dapat dikatakan bahwa efektivitas tersebut makin tinggi.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indicator berdasarkan konsep dan teori yang ada, ukuran efektivitas

akan menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telag dilaksanakan. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari siapa yang menilai dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh.

Menurut Sutrisno dalam (Ramadhan, 2018) menjelaskan bahwa ukuran efektivitas program di dalam suatu organisasi meliputi:

1) Pemahaman program
2) Tepat sasaran
3) Tepat waktu
4) Tercapainya tujuan
5) Perubahan nyata

Efektivitas merupakan konsep yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dipahami sebagai suatu kontinum yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan, mulai dari sangat tidak efektif hingga sangat efektif, tergantung pada sejauh mana sasaran organisasi dapat direalisasikan.

Menurut Mahmudi (2019:86), efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, dimana suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas berfokus pada pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Selanjutnya, Mutiarin dan Zaenudin (2020:112) menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya tujuan, tetapi juga dari kualitas hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Sutrisno (2019:123), efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat waktu. Dalam hal ini, efektivitas juga berkaitan dengan bagaimana organisasi mampu mengelola berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

1) Struktur organisasi,
2) Teknologi yang digunakan,
3) Lingkungan eksternal,
4) Lingkungan internal,
5) Keterlibatan atau komitmen karyawan terhadap organisasi,
6) Prestasi kerja karyawan, dan
7) Kebijakan manajemen.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, Beni (2018:69) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, serta menjadi ukuran sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan, khususnya dalam sektor publik. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila memiliki kontribusi yang

signifikan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Suatu program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai proses sekaligus hasil dari pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki.

b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas merupakan sebagai suatu keberhasilan dalam melakukan program yang dipengaruhi oleh berbagai factor-faktor yang dapat menentukan efektivitas organisasi berhasil dilakukan dengan baik atau tidak.

Berikut ini, dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kefektifan oerganisasi dari muhyadi (dalam Syumsu Q. Badu dan Novianty Djafri, 2017, p. 133-135):

1) Karakteristik Organisasi.

   Karakteristik organisasi berkaitan erat dengan struktur dan teknologi yang ditetapkan, tingkat kompleksitas dan formalitas struktur serta system kewenangan dalam pengambilan keputusan (sentralisasi dan desentralisasi) berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Struktur yang mendukung tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi bergantung pada jenis organisasi serta tujuan yang akan dicapai.

2) Karakteristik Lingkungan

   Organisasi tidak berjalan sendirian malainkan Bersama beberapa organisasi lain dalam lingkungan yang lebih luas. Dengan kata lain, interaksi antara organisasi dengan lingkungan merupakan sesuatu yang lazim sehingga keberhasilan sebuah

organisasi dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan interaksi dengan lingkungan.

3) Karakteristik Pekerja

Faktor manusia (anggota organisasi) merupakan factor yang berpengaruh besar terhadap efektivitas, perilaku anggota dapat dapat dikatakan sebagai dukungan yang paling berarti bagi pencapaian keefektifan organisasi. Namun disitu sisi hal ini dapat dikatakan sebagai hambatan yang sanggup mengurangi bahkan menggagalkan keefektifan. Satul hal yang selalu terdapat pada setiap organisasi ialah bahwa masing-masing anggota memiliki karateristik dari satu anggota kepada anggota lain sehingga mempengaruhi perilaku.

4) Kebijakan yang diambil seorang manajer dalam mengelola organisasi memiliki dampak langsung terhadap keefektifan organisasi. Hal ini meliputi proses dan mekanisme kerja yang berlangsung dalam sebuah organisasi. Pada intinya, aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan manajer mencakup penentuan tujuan yang strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien untuk menciptakan lingkungan yang merangsang anggota untuk berprestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kemampuan organisasi dalam merespon lingkungan.

c. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, siapa yang menilai dan menginterpresentasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi harus memberikan pemahaman efektivitas terhadap kualitas dan kuantitas (output) suatu barang dan jasa.

Tingkat efektivitas tersebut juga dapat diukur dengan membandingkan hasil nyata yang telah diwujudkan dari kegiatan atau usaha tersebut, namun jika hasil kegiatan atau usaha yang dilakukan tidak tepat maka akan menyebabkan tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, sehingga hal ini dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Steers (Sutrisno, 2019, p. 106) bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau kegiatan perlu diperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

1) Produksi
2) Efesiensi
3) Kepuasan
4) Adaptasi
5) Perkembangan

Menurut Sedarmayanti (2019) bahwa pengkuran efektivitas secara umum dan paling menonjol, yaitu:

1) Pencapaian tujuan
2) Ketepatan waktu
3) Kualitas hasil (output)
4) Kepuasaan penerima manfaat

Menurut Budiani (Sari, 2021, p. 15) menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan variable-variabel sebagai berikut:

1) Sosialisasi program
2) Tujuan Program
3) Pemantaun program

Menurut Sutrisno (Amrizal, 2018, p. 43) bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan perlu diperhatikan beberapa sub variable, yaitu:

1) Pemahaman program
2) Tepat sasaran
3) Tepat waktu
4) Tercapainya tujuan
5) Perubahan nyata

Dari beberapa teori diatas dilihat dari observasi awal dilapangan, maka aspek yang paling sesuai dengan mengukur efektivitas yaitu menurut Sedarmayanti (2019:59) yaitu:

1) Pencapaian tujuan adalah indikator utama dalam mengukur efektivitas suatu program. Indikator ini menilai sejauh mana tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan. Tujuan program biasanya telah dirumuskan secara jelas dalam perencanaan, baik dalam bentuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Pencapaian tujuan tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi juga dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa suatu program dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan harapan awal.
2) Ketepatan waktu adalah indikator yang menunjukkan apakah suatu program dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Waktu menjadi indicator penting karena keterlambatan dalam pelaksanaan program dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
3) Kualitas hasil (output) adalah indikator yang menilai mutu dari hasil yang dicapai oleh suatu program. Tidak cukup hanya mencapai tujuan, tetapi hasil yang diberikan juga harus memenuhi standar kualitas tertentu agar benar-benar bermanfaat. Bahwa kualitas output berkaitan dengan kesesuaian hasil dengan kebutuhan penerima serta standar yang telah ditetapkan. Output yang berkualitas akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberhasilan program.

4) Kepuasaan penerima manfaat adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana program mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Kepuasaan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan suatu program.

2. Bantuan Sosial Pada Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

a. Pengertian Bantuan Sosial

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, maka pemerintah Indonesia telah membuat suatu kebijakan pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) bagi penduduk Indonesia. Pengertian bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus-menerus dan selektif, bantuan tersebut bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sedangkan pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara atau Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat.

Program bantuan sosial untuk rakyat Indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Rastra atau Bantuan Non-Tunai Program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial.

Pengelolaan bantuan sosial ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Aturan ini mencabut Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pemberi bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian atau Lembaga pada pemerintah pusat dan atau satuan kerja perangkat daerah pada

pemerintahan daerah, pemberi bantuan sosial tersebut bertugas untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial dan pelayanan dasar.

b. Pengertian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat (KPM) . Adapun tujuan utama dari BPNT tersebut adalah untuk mengatasi atau menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

BPNT adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu setiap bulannya. Pada dasarnya, BPNT adalah bantuan sosial yang berfokus pada penyaluran dukungan sembako sebagai bahan pangan pokok masyarakat.

c. Manfaat Yang Diperoleh Dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

1) Meningkatkannya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.

d. Syarat Penerima Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT)

1) Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan NIK KTP.
2) Sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG).
3) Tidak Menerima gaji minimal UMR sebagai penerima aktif atau pensiunan.
4) Tidak menjadi pedamping sosial diprogram-program tertentu.
5) Berasal dari keluarga tidak mampu, tercatat dalam desil terbawah data kemiskinan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Keluarga (KK) yang valid dan terdaftar di dukcapil.

Melalui upaya dan syarat yang dilakukan pemerintah berharap dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) .

3. Cadangan Beras Pemerintah

a. Pengertian

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah persedian beras yang diatur dan dikelola oleh Pemerintah pada Perum BULOG, dengan arahan penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana san kerawanan pangan pasca bencana.

Badan Pangan Nasional yang dipimpin oleh Arief Prasetyo Adi, mengumumkan bahwa alokasi bantuan sosial berupa beras

dengan mencapai Rp. 8 Triliun sebanyak 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan ini, dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Kusambi Hulu akan mendapatkan I0 kg beras setiap bulan.

Berdasarkan Pasal 15 UU No 11 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1) Bantuan sosial tersebut bertujuan agar seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan atau berkelanjutan dalam bentuk
    a) Bantuan sosial
    b) Penyediaan aksebilitas
    c) Penguasaan kelembagaan

Jadi program bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional diberikan agar dapat membantu masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjaga kelangsungan hidup.

b. Kriteria Calon Penerima Bantuan CBP

Calon penerima CBP adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut

1) Masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH yang lebih khusus yang memiliki kartu merah putih

2) Masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan)
3) Masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau penyakit kronis

Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai Berupa Cadangan Beras Pemerintah

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek efektivitas dengan menggunakan teori Sadermayanti (2019:59) yang mengungkapkan bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah.

1. Pencapaian tujuan adalah indikator utama dalam mengukur efektivitas suatu program. Indikator ini menilai sejauh mana tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan melalui pelaksanaan kegiatan. Tujuan program biasanya telah dirumuskan secara jelas dalam perencanaan, baik dalam bentuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Pencapaian tujuan tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi juga dari kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan target yang telah

ditetapkan. Hal ini berarti bahwa suatu program dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan harapan awal.

2. Ketepatan waktu adalah indikator yang menunjukkan apakah suatu program dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Waktu menjadi indikator penting karena keterlambatan dalam pelaksanaan program dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
3. Kualitas hasil (output) adalah indikator yang menilai mutu dari hasil yang dicapai oleh suatu program. Tidak cukup hanya mencapai tujuan, tetapi hasil yang diberikan juga harus memenuhi standar kualitas tertentu agar benar-benar bermanfaat. Bahwa kualitas output berkaitan dengan kesesuaian hasil dengan kebutuhan penerima serta standar yang telah ditetapkan. Output yang berkualitas akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberhasilan program.
4. Kepuasaan penerima manfaat adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana program mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Kepuasaan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan suatu program.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

